

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 21-23 November 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Antarane.ws.com	Minggu, 22 November 2020	PUPR tingkatkan kualitas infrastruktur lewat pemanfaatan data geologi	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan infrastruktur wilayah dengan memanfaatkan berbagai data dan informasi, khususnya data dan informasi geologi.</p> <p>https://www.antarane.ws.com/berita/1853896/pupr-tingkatkan-kualitas-infrastruktur-lewat-pemanfaatan-data-geologi</p>
2	Antarane.ws.com	Minggu, 22 November 2020	Permudah mobilitas warga, PUPR bangun jembatan gantung Mekar Baru	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur kerakyatan berupa Jembatan Gantung di Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten dalam rangka mempermudah mobilitas warga.</p> <p>https://www.antarane.ws.com/berita/1853736/permudah-mobilitas-warga-pupr-bangun-jembatan-gantung-mekar-baru</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/311289/kementerian-pupr-ri-bangun-jembatan-gantung-mekar-baru-di-kabupaten-serang-banten</p>
3	Antarane.ws.com	Minggu, 22 November 2020	Menteri PUPR ajak Kadin inovasi teknologi ketahanan pangan	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak para pengusaha Indonesia khususnya yang tergabung di Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk bisa mengisi pengembangan inovasi dan teknologi dalam rangka ketahanan pangan Indonesia.</p> <p>https://www.antarane.ws.com/berita/1853400/menteri-pupr-ajak-kadin-inovasi-teknologi-ketahanan-pangan</p>
4	Antarane.ws.com	Minggu, 22 November 2020	Menteri PUPR: Indonesia harus terapkan pengelolaan cerdas SDA	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendorong Indonesia menerapkan pengelolaan cerdas sumber daya air (SDA) atau smart water management (SWM).</p> <p>https://www.antarane.ws.com/berita/1853132/menteri-pupr-indonesia-harus-terapkan-pengelolaan-cerdas-sda</p> <p>https://www.beritasatu.com/edi-hardum/ekonomi/701227/indonesia-terapkan-pengelolaan-sumber-daya-air-terpadu</p> <p>https://economy.okezone.com/read/2020/11/22/470/2313868/menteri-basuki-ingin-terapkan-smart-water-management-apa-keuntungannya</p>
5	Antarane.ws.com	Sabtu, 21 November 2020	Sempat lesu, lalu lintas kendaraan di jalan tol kembali meningkat	<p>Pandemi COVID-19 ikut menghantam sektor lalu lintas (traffic) jalan tol, yang merupakan dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memaksa masyarakat untuk beraktivitas dari rumah.</p> <p>https://otomotif.antarane.ws.com/berita/1852220/sempat-lesu-lalu-lintas-kendaraan-di-jalan-tol-kembali-meningkat</p> <p>https://www.beritasatu.com/harso-kurniawan/ekonomi/701207/sektor-jalan-tol-tahan-banting</p>
6	Timesindonesia.co.id	Minggu, 22 November	Kementerian PUPR RI Luncurkan Buku	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus berkomitmen mendukung</p>

		2020	'Jalan di Indonesia dari Sabang Sampai Merauke'	peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden RI Jokowi bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur pendidikan. Di samping itu, Kementerian PUPR RI juga berkomitmen untuk turut berkontribusi pada literasi infrastruktur di Indonesia. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/311169/kementerian-pupr-ri-luncurkan-buku-jalan-di-indonesia-dari-sabang-sampai-merauke
7	Timesindonesia.co.id	Sabtu, 21 November 2020	Kementerian PUPR RI Raih Tiga Penghargaan Anugerah Indonesia Property & Bank Award 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) menerima tiga penghargaan sekaligus di Anugerah Indonesia Property & Bank Award 2020 di Jakarta, Jumat (20/11/2020). https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310980/kementerian-pupr-ri-raih-tiga-penghargaan-anugerah-indonesia-property--bank-award-2020
8	Timesindonesia.co.id	Jumat, 20 November 2020	Kementerian PUPR RI: Jalan Tol Layang AP Pettarani di Makassar Siap Dioperasikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus menambah kapasitas jalan pada kawasan perkotaan metropolitan. Salah satu ruas yang siap diresmikan dan dioperasikan adalah Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 atau dikenal dengan Jalan Tol Layang Andi Pangeran Pettarani (Tol Layang AP Pettarani) Kota Makassar, Sulawesi Selatan sepanjang 4,3 km. Tol ini akan menghubungkan Kota Makassar dengan Pelabuhan Petikemas Soekarno Hatta Makassar dan Bandara Sultan Hassanudin. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/310981/kementerian-pupr-ri-jalan-tol-layang-ap-pettarani-di-makassar-siap-dioperasikan
9	Cnnindonesia.com	Jumat, 20 November 2020	Pembangunan Tahap I 10 'Bali Baru' Capai 57,8 Persen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan tahap pertama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau proyek 10 "Bali Baru" mencapai 57,8 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201120100926-92-572231/pembangunan-tahap-i-10-bali-baru-capai-578-persen
10	Detik.com	Sabtu, 21 November 2020	Wuss! Tol Cinere-Serpong Beroperasi Fungsional Bulan Depan	Jalan Tol Cinere-Serpong ditargetkan bisa beroperasi fungsional untuk mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru 2021. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5264435/wuss-tol-cinere-serpong-beroperasi-fungsional-bulan-depan?_ga=2.259291970.975732309.1606096730-1745634070.1586912911
11	Detik.com	Sabtu, 21 November 2020	Seputar Rencana di Pelabuhan Patimban	Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menjelaskan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Subang, Jawa Barat bakal terhubung dengan tol 2 tahun lagi. Pelabuhan ini sendiri ditargetkan siap melayani kegiatan ekspor-impor mulai Desember 2020. Menurut Budi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh Pelabuhan Patimban dengan menyediakan akses jalan. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5263965/seputar-rencana-di-pelabuhan-patimban?_ga=2.259291970.975732309.1606096730-1745634070.1586912911
12	Tempo, Halaman	Senin, 23 November	Pemerintah Berjanji Permudah Investasi	Pemerintah berjanji akan menyiapkan kemudahan investasi bidang infrastruktur dalam undang-undang cipta kerja. Staf

	Ekonomi Bisnis 3	2020	Infrastruktur	ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahamam Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian.
--	---------------------	------	---------------	---

Judul	Pemerintah Berjanji Permudah Investasi Infrastruktur	Tanggal	Senin, 23 November 2020
Media	Tempo, Halaman Ekonomi Bisnis 3		
Resume	Pemerintah berjanji akan menyiapkan kemudahan investasi bidang infrastruktur dalam undang-undang cipta kerja. Staf ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian.		

EKONOMI DAN BISNIS

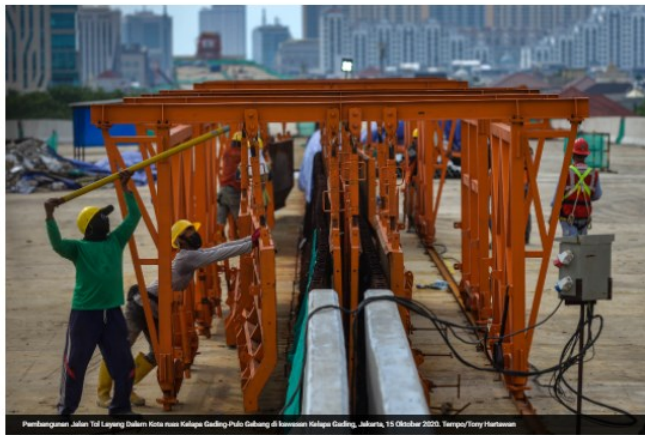
Pemerintah Berjanji Permudah Investasi Infrastruktur

Sebanyak 18 kementerian dan lembaga telah menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko.

EDISI 23 NOVEMBER 2020



REPORTER: TEMPO



Pembangunan Jalan Tol Layang Dalam Kota baru Kelapa Gading, Pulo Gedang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, 15 Oktober 2020. Tempo/Tony Hartono

JAKARTA – Pemerintah berjanji akan menyiapkan kemudahan investasi bidang infrastruktur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian, Elen Setiadi, menuturkan bahwa hal itu diwujudkan melalui integrasi berbagai ketentuan yang berhubungan dengan proyek infrastruktur, antara lain akses tata ruang, pengadaan tanah, dan perizinan lingkungan berbasis risiko. “Kami melakukan penyesuaian, perubahan, dan percepatan dari sisi mekanisme serta proses bisnisnya,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia mencontohkan, untuk akses tata ruang nantinya dapat dilakukan langsung secara digital oleh masyarakat, meliputi rencana detail tata ruang (RDTR) serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/kabupaten dan provinsi. “Untuk pengadaan tanah, kami atur mengenai siapa obyeknya. Bagaimana kalau ada mekanisme ganti rugi? Kami siapkan dengan komprehensif tanpa merugikan kepentingan masyarakat,” kata Elen.

Aturan teknis juga disiapkan untuk kebutuhan pendirian bangunan atau infrastruktur lain dengan mengoptimalkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Nanti PUPR memberikan standar teknis mengenai pembangunannya, bagaimana aspek pengawasan, hingga sanksi kalau tidak mengikuti standar itu,” ujarnya.

Setelah disahkan pada 2 November lalu, pemerintah berkomitmen segera merampungkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) krusial yang disebut adalah perihal kemudahan perizinan, yaitu tentang perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan, yang akan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berujar, RPP tersebut akan mengatur jenis perizinan untuk berbagai sektor, termasuk investasi infrastruktur yang mencakup kewenangan penerbitan perizinan dan pelaksanaan pengawasan. “Karena perizinan yang berbasis risiko akan memberi kemudahan dan kepastian,” ujar Airlangga.

Selama ini, ketika ingin melakukan investasi, pelaku usaha banyak dihadapkan pada persoalan kebijakan yang berbeda-beda di setiap sektor. Belum lagi adanya tumpang-tindih regulasi antarsektor yang membuat proses perizinan menjadi lebih lama. “Selama ini tidak terstandarisasi baik dari segi persyaratan yang harus dipenuhi maupun dari jangka waktu penyelesaian, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.”

Saat ini sebanyak 18 kementerian dan lembaga yang terkait dengan regulasi perizinan usaha telah menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko di internal untuk kegiatan yang usahanya dibina di masing-masing kementerian/lembaga. Beberapa kementerian yang telah menyelesaikan proses dan NSPK itu adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Abdul Kamarzuki, mengungkapkan salah satu investasi yang diharapkan semakin menggeliat adalah pengembangan kawasan ekonomi. Terlebih, terdapat serangkaian fasilitas dan kebijakan yang dipermudah, khususnya perihal pengadaan tanah. “Kami juga memberikan kemudahan perizinan untuk pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).”

Menurut Abdul, saat ini RDTR masih minim sehingga bisa menjadi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Maka, dengan aturan turunan UU Cipta Kerja, Kementerian akan mendorong proses RDTR menjadi lebih cepat dan dapat disahkan menjadi RTRW. “Kami akan mengawal setiap pembangunan PSN, dan saat ada pengajuan izin yang sudah ada RDTR-nya, akan langsung kami proses perizinannya,” katanya.

GHOIDAH RAHMAH

Menyiapkan Aturan Turunan

SEJAK disahkan beberapa waktu lalu, pemerintah berusaha menyiapkan sejumlah aturan turunan sebagai kerangka teknis pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut ini sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang mendukung investasi proyek infrastruktur.

- RPP Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah
- RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- RPP Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- RPP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- RPP Bank Tanah
- RPP Penyelesaian Ketidaksiesuaian Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak atas Tanah
- RPP Penyelenggaraan dan Penataan Ruang